TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i5.1374

IMPLEMENTASI PENILAIAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013

Ina Magdalena[1], Aan Nurchayati[2], Anastasia[3]
Universitas Muhammadiyah Tangerang
inapgsd@gmail.com ; aannurchayati@gmail.com

Abstract

One aspect that made the change and arrangement in curriculum 2013 is the standard of assessment witch tailored to the content standards, competency standards and the process standards. Nonetheless, in the end the arrangement of the assessment focused on learning. Skills assessment requires studant to demonstrate a certain competence. This assessment is intended to determine whether the knowledge has been mastered learners can be used to identify and solve problems in real life. Mastery learning for skills determined by the school, gradually continue to improve the school completeness criteria studied by considering the potential and characteristics of each school as a form of improving the quality of learning outcomes. The approach research is a qualitative research with descriptive methods. These results indicate that, the implementation of the curriculum 2013 there are still many obstacles. This constraint is caused by many factors. The dominant factor is the desire or willingness of teachers in applying the skills assessment system contained in this curriculum. There is still the need for the participation of various stakeholders in the success of the application of the system of assessment of skills in the curriculum 2013. The government should continue to socialize and training in enhancing the competence of teachers on aspects pence judgments of these skills.

Keywords *: Citizenship Skills Assessment, Curriculum 2013*

Abstrak: : Salah satu aspek yang dijadikan perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian yang disesuaikan dengan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses. Meskipun demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap bermuara dan berfokus pada pembelajaran. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real life). Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan, secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kurikulum 2013 masih memiliki berbagai kendala yang disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan adalah keinginan atau kemauan guru dalam menerapkan sistem penilaian tersebut. Selain itu, masih diperlukan peran serta dari berbagai pihak dalam mensukseskan penerapan sistim penilaian keterampilan pada kurikulum 2013 ini. Pemerintah sebaiknya terus

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi guru pada aspek penilaian keterampilan.

Kata Kunci : Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan, Kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi siswa, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Fokus penilaian dalam kurikulum 2013 adalah keberhasilan belajar siswa dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan meliputi: sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pencapaian kompetensi siswa benar-benar terukur dan empiris, oleh karena itu harus ada rumusan yang jelas tentang kriteria kompeten tersebut. Berikut adalah kriteria kompeten yang harus dicapai oleh siswa, antara lain: 1) Siswa mampu memahami konsep yang mendasari standar kompetensi yang harus dikuasai. 2) Siswa mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi yang harus dicapai dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. 3) Siswa mampu mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. jika kita melihat kepada kurikulum 2013 penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian yang dilakukan mencakup kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru harus merancang instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dari mata pelajaran dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada pandangan bahwa nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013. Pada bagian lain, pemunculan kembali nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila. Melalui empat konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa, menjadi pokok materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Hal ini yang menyebabkan secara terminologi untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), sedangkan ranah keterampilan (psikomotor) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren).

Hal lainnya ialah, kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan keterampilan menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran dan penilaian yang bersifat otentik.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013, hlm. 3), mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal1individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik. Selain itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value-based education dengan

kerangka sistemik sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2008) "Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab". Secara teoretik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (civic knowledge, civic disposition, dan civic skills) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru ini mengusung tujuan utama mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (civic competences) yakni civic knowledge (pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan), civic disposition (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan civic skills (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara (Quigley dalam Winataputra, 2001, hlm. 317-318)

Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) itu sendiri merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intelectual skills (kecakapan intelektual) dan participation skills (kecakapan partisipasi)

Negara dalam ruang kelas dan luar kelas. Dengan Kurikulum 2013 ini memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Pemberlakuan kurikulum 2013 menuntut sejumlah perubahan mendasar pada proses pembelajaran yang berlangsung di persekolahan. Minimalnya ada dua perubahan mendasar yang dilakukan yakni perubahan pada sistem pembelajaran dan sistem penilaian. Perubahan pada sistem pembelajaran artinya pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus dilakukan dengan tujuan utama agar peserta didik memperoleh kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan di dalam masyarakat abad ke-21. Oleh sebab itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 dilakukan dengan berdasar pada pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan sistem pembelajaran ini, sistem penilaian pun diubah menjadi penilaian yang bersifat otentik. Penilaian otentik ini diharapkan mampu digunkan untuk mengukur kemampuan peserta didik sesuai dengan performa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, optimalisasi penggunaan penilaian otentik akan berdampak pula pada peningkatan kualitas pembelajaran karena ragam penilaian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan pembelajaran selain sebagai alat penilaian hasil belajar.

Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini masih menempatkan tes sebagai pelengkap proses pembelajaran. Kondisi semcam ini harusnya mulai dihilangkan dan sebaliknya teslah yang menjadi pemandu pembelajaran. Konsep semacam ini dikenal dengan Test Driven Instruction. Abidin (2014, hlm. 6) menyatakan bahwa konsep Test Driven Instruction merupakan sebuah konsep yang meyakini bahwa mutu proses pembelajaran akan mampu meningkatkan dengan optimal jika pembelajaran dipandu oleh serangkaian kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian tersebut tentu saja adalah penilaian otentik yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai setiap aktivitas yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Peranan penilaian dalam hal ini adalah menentukan spesifikasi kegiatan yang harus dilakukan peserta didik, menentukan standar atas spesifikasi kegiatan tersebut, serta menentukan skoring bagi capaian yang diperoleh peserta didik selama beraktivitas tersebut.

Maka, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa, yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor atau dalam kurikulum 2013 cakupannya adalah perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relative setiap peserta didik terhadap standar yang ditetapkan.

Tetapi pada kenyataannya selama ini guru-guru didalam proses pembelajaran dan penilaiannya lebih menekankan pada aspek kognitif dengan didominasi satu metode yaitu tes tertulis, aspek sikap dan keterampilan menjadi dikesampingkan. Hal ini terjadi karena guru hanya paham secara teoritis tentang penyusunan instrumen penilaian sikap dan psikomotor tetapi belum mampu mempraktikkannya dalam penyusunan, pelaksanaan di dalam kelas, dan cara analisis hasil implementasinya di dalam kelas (Akif, dkk., 2015, hlm. 2; Syukri, 2014, hlm. 127).

Pelaksanaan pembelajaran PKn sendiri lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan lainnya menjadi terbengkalai. Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan guru/dosen harus selalu mengejar target materi (Budimansyah, 2006, hlm. 40).

Oleh karena itu aspek penilaian yang menarik untuk dibahas adalah penilaian kompetensi keterampilan. Karena penilaian keterampilan jarang dilakukan oleh guru yang hanya cenderung melakukan penilaian pada aspek kognitif saja.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan deskritiptif analitis mengenai implementasi penilaian keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 di SD AL FITROH Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara guru membuat perencanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.
2. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.
4. Mengupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Bahwa penelitian implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013, merupakan suatu hal yang terjadi pada saat sekarang di lingkungan sekolah dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Jadi hasil analisis dari penelitian tersebut berupa pemaparan gambaran mengenai situasi objek yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Lokasi penelitian adalah sekolah SD AL FITROH. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis data berkaitan implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013, dengan subjek penelitian Guru PPKn dan siswa SD AL FITROH.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013, hlm. 30). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dari dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data untuk keperluan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Penelitian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013

1. Analisis SKL, KI, dan KD

   Perencanaan penilaian keterampilan yang dilaksanakan pada SD AL FITROH pada dasarnya sudah memenuhi kreteria yang semestinya. Pengetahuan dan kemampuan guru dalam menyusun rencana penilaian yang sesuai dengan prosedur.

   Pengembangan SKL, KI, dan KD difokuskan pada pembentukkan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konstekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian

sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap konsep apa yang dipelajari.

Berdasarkan SKL, KI, dan KD yang sudah ditentukan, maka fokus pertama dan utama bagi guru dalam rangka menyiapkan pembelajaran adalah melakukan analisis pada ketiga kompetensi tersebut. Banyak manfaat yang didapatkan guru dengan melakukan tindakan analisis SKL, KI, dan KD ini. Dari hasil wawancara penulis dengan guru, ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh guru, diantaranya adalah pertama, guru dapat mengetahui materi yang esensial yang harus dikuasai oleh peserta didik maksudnya suatu materi pembelajaran ada sifatnya berkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya secara terus menerus mulai dari satu semester kesemester berikutnya oleh karena itu guru harus memperhatikan hal yang demikian guna memprogramkan dan merencakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan1tahapan yang diperlukan. Kedua, Guru dapat memilih materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik sekolah serta masyarakat. Artinya dengan pemetaan ini guru dapat memilah dan memilih materi apa yang cocok dengan terhadap peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya tingkat kemampuannya dan tingkat kecerdasan emosionalnya. ketiga, guru dapat menyaji materi secara sistematis, dari mudah ke sukar, dari yang konkrit keabtrak dan lain-lain. Artinya dalam kegiatan pembelajaran seorang guru menyampikana materi harus secara hirarki dari yang mudah kepada yang sulit, hal ini berguna untuk mudah dipahami dan dimengerti oleh anak didik. keempat, Guru dapat menentukan alokasi waktu yang tepat untuk setiap bahan sesuai dengan tingkat kesukarannya. Maksudnya alokasi waktu bisa dibagi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sering terjadi pada guru bahwa dalam penyampaiaan materi kurang memperhitungkaan waktu yang tersedia sehingga materi tidak terserap dengan baiaak oleh peserta didik. Artinya kehabisan waktu tidak sampai kepada tujuan pembelajaran.

Tidak kalah pentingnya bahwa setelah melakukan analisis SKL, KI, KD ini, guru dapat menentukan alat penyajian, alat pengukuran kemampuan murid terhadap materi. Maksudnya media yang digunakan akan bisa diketahui kalau pemetaan dilaksanakan hal ini dapat kita ketahui dari aspek materinya yang dilihat dari KD suatu pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat membangkitkan minat peserta didik artinya perencanan yang matang pembelajaran dapat dikemas dengan melihat kepada semua aspeknya maka dalam penyajian akan menciptakan pembelajaran yang

PAKEM yaitu pembelajaran yang aktif kreatif dan menyenangkan dan hal ini sudah tercipta dengan sendirinya motivasi dan minat belajar peserta didik tumbuh.

2. Pengembangan Indikator dan Penetapan KKM

Pendekatan penilaian yang digunakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SD AL FITROH adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristrik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

Sebelum dirumuskan dan dihitungnya KKM, guru dituntut mampu merumuskan indikator. Realitanya, guru memang telah melangkah merumuskan indikator pembelajaran yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan RPP. Hasil wawancara dengan guru ditahui bahwa penyusunan dan pembuatan perencanaan pembelajaran tersebut dibuat dan disusun secara Bersama-sama melalui pertemuan guru tingkat kabupaten/kota atau tingkat musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah (MGMP atau KKG).

Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang membandingkan capaian peserta didik dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Hasil penilaian seorang peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan belajar minimal yang disebut juga dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

3. Membuat Kisi-Kisi dan Instrumen Penilaian Ketrampilan

Kisi-kisi adalah format pemetaan soalyang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Jika Anda memiliki kisi-kisi yang baik, maka Anda akan memperoleh perangkat soal yang relatif sama sekalipun penulis soalnya berbeda. Dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun berdasarkan indikator setiap mata pelajaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SD AL FITROH, diakui bahwa terhadang guru sering tidak

mempersiapkan kisi-kisi dan instrument penilaian keterampilan terlebih dahulu. Tetapi diakui juga bahwa penilaian ini disertai dengan rubik penskoran. Rubik penskoran ini biasanya di letakkan dalam RPP. Oleh karena itu, penilaian yang paling sering dilakukan oleh guru adalah peilaian proses., dengan menyajikan studi-studi kasus yang harus dipecahkan oleh siswa baik secra langsung di dalam kelas maupun di luar kelas yang berupa pembuatan makalah.

Penilaian dilakukan oleh guru dari proses sampai penyajian produk atau proyek yang ditugaskan kepada siswa. Perencanaan penilaian keterampilan melalui produk, projek kewarganegaraan sering mengalami benturan hambatan. Hal ini diakui oleh guru dikarenakan kemampuan anak yang berbeda-beda sehingga sering terjadi distorsi antara yang pemahamannya baik terhadap tugas dengan yang pemahamannya kurang baik terhadap tugas yang diberikan oleh guru.

Pelaksanaan Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013

Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real life). Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan, secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar.

Pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui penilaian praktik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio yang diberikan setelah pembelajaran. Penilaian keterampilan dapat juga dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik kompetensi dasar.

1. Penilaian Proses Pembelajaran

   Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta internalisasi karakter dan pembentukkan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Dalam hal ini, penilaian proses

dilakukan untuk menilai aktivitas, kreativitas dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama keterlibatan mental, emosional, dan sosial dalam pembentukkan kompetensi serta karakter peserta didik.

Penilaian proses dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan refleksi. Pengamatan dapat dilakukan oleh guru ketika peserta didik sedang mengikuti pembelajaran, mengajukan pertanyaan/permasalahan, merespon atau menjawab pertanyaan, berdiskusi dan mengerjakan tugastugas pembelajaran lainnya, baik dikelas maupun di luar kelas. Pengamatan ini dapat dilakukan oleh sesama guru, atau juga bisa dilkukan oleh pendamping. Sedangkan refleksi bisa dilakukan oleh guru beserta peserta didik, dengan melibatkan guru lain (observer) atau pendamping (ahli kurikulum dan pembelajaran). Refleksi juga bisa melibatkan kepala sekolah agar ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan sekolah. Refleksi ini merupakan tindak lanjut dari pengamatan (observasi), sehingga apaapa yang dibicarakan dalam refleksi adalah hasil observasi, beserta hasil-hasil lain yang muncul dalam pembelajaran.

Penilaian proses kegiatan pembelajaran yang terjadi di ruang kelas adalah partisipasi guru dan peserta didik, interaksi antara guru dan peserta didik, suasana pembelajaran di dalam kelas, mutu pembelajaran, dan komponen pembelajaran lainnya.

2. Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian Ketrampilan

Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik/kinerja, proyek, produk, dan portofolio. Teknik penilaian lain dapat digunakan sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4 pada mata pelajaran yang akan diukur. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.

Kendala Yang DIhadapi Oleh Guru dan Peserta Didik mengenai Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013

Pemberlakuan kurikulum 2013 akan menghadapi sejumlah tantangan. Minimalnya tantangan tantangan tersebut akan berkenaan dengan guru, waktu, TIK, bahan ajar, penilaian, dan strategi pembelajaran.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap guru dan siswa di SD AL FITROH, terungkap bahwa kendala yang paling dominan dalam menerapkan penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah berkenaan dengan waktu pelaksanaan. Ketidakmerataan kemampuan siswa menyebabkan penilaian keterampilan kewarganegaraan melalui produk atau proyek sering melenceng dari perencanaan.

Administrasi penilaian yang lebih banyak dan rumit memerlukan proses yang panjang untuk satu kali penilaian, membuat guru merasa kesulitan dalam melakukan penilaian menggunakan lembar penilaian.

Padatnya materi pembelajaran serta banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh mata pelajaran lain juga di sekolah merupakan factor yang dominan sehingga tidak maksimalnya pengerjaan produk atau proyek yang dilakukan oleh siswa. Siswa juga sering merasa kesulitan dalam mengerjakan produk dan proyek dikarenakan materi yang belum tersampaikan.

Pendidikan saat ini harus kita akui tidak bisa terlepas dari system teknologi informasi. Fasilitas ini sangat mendukung siswa dalam pembelajaran. Penyediaan layanan hot spot dan perpustakaan digital di sekolah seperti yang diterapkan di SD AL FITROH ini sangat membantu akses siswa terhadap materi dan akses terhadap referensi dari penugasan yang diberikan oleh guru. Dan pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap proses penilaian keterampilan kewarganegaraan yang diterapkan oleh guru mereka.

Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Mengenai Penilaian Ketrampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013

Berkaitan dengan administrasi penilaian yang dianggap lebih banyak dan rumit memerlukan proses yang panjang untuk satu kali penilaian, membuat guru merasa kesulitan dalam melakukan penilaian menggunakan lembar penilaian. Guru harus mampu membiasakan kultur menilai sesuai Kurikulum 2013 dan membuat bentuk administrasi penilaian lebih dipersingkat dan dipermudah.

Dalam pengimplementasianya kurikulum 2013 ini sangat dipengaruhi oleh beberapa factor yang saling berpengaruh satu dengan yang lainya. Maka sebenarnya kesuksesan implementasi ini harus didukung oleh semua pihak tak terkecuali sekolah sebagai eksekutor utama. Mulyasa dalam bukunya pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 menyebutkan ada delapan kunci sukses 2013 yaitu: kepemimpinan kepalasekolah, kreatifitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi kurikulum 2013, fasilitas dan sumberbelajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah.

Pertama, Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 karena kepala sekolah memiliki tugas utamanya dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia.

Kedua, kreativitas guru karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar. Guru diperlukan agar menjadi fasilitator dan mitra belajar peserta didik, tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik tapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (facilitate learning).

Ketiga, yang menentukan keberhasilan implimentasi Kurikulum 2013 adalah aktivitas peserta didik. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan aktivitas peserta didik, guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri. Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat penegak disiplin dalam setiap aktivitasnya.

Keempat, sosialisasi dalam kurikulum 2013 sangatlah penting dilakukan agar semua pihak yang terkait dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan yang harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan. Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum 2013 adalah seluruh warga sekolah, bahkan seluruh masyarakat dan orang tua peserta didik.

Ke-lima, setelah sosialisasi kemudian mengadakan musyawarah antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari berbagai pihak dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum 2013.

Ke-enam, fasilitas dan sumber belajar yang harus dikembangkan antara lain 1) laboratorium, 2) buku ajar, 3) pusat sumber belajar, 4) perpustakaan, dan 5) tenaga pengelola dan kemampuan pengelolanya. Terkait dengan tenaga pengelola dan kemampuan pengelola, salah satu contohnya adalah kapasitas dan kreatifitas guru. Guru diharapkan mampu mengkonstruksi sumber belajar untuk siswa, pun juga dengan alat pembelajaran dan alat peraga. Alat pembelajaran dan alat peraga diharapkan mampu diciptakan sendiri oleh guru melalui pemanfaatan lingkungan sekitar. Adapun contoh pemanfaatan lingkungan sekitar seperti batu, daun, tanah, tumbuhan, keadaan alam, kondisi pasar dan segala sesuatu yang berada dilingkungan kita yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Point penting lainnya

yang harus diperhatikan untuk menggunakan fasilitas dan sumber belajar adalah kesesuaian fasilitas dan sumber terhadap kompetensi yang ingin dicapai. Sehingga disini guru dituntut kreatif untuk dapat menggunakan fasilitas dan sumber belajar yang tepat sehingga siswa tercapai kompetensi yang diharapkan. fasilitas dan sumber belajar yang kaitannya dengan suksesi implementasi kurikulum 2013 yaitu 1) dengan membawa sumber belajar kedalam kelas dan 2) membawa kelas ke lapangan tempat sumber belajar berada.

Ke-tujuh, lingkungan yang kondusif akademik maksudnya adalah lingkungan baik fisik maupun non fisik yang dapat menciptakan suasana aman, nyaman, tertib, optimis, tertib dan bersih yang dapat meningkatkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Lingkungan yang kondusif akademik akan menciptkan iklim belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebaliknya jika iklim belajar itu kurang baik maka akan tercipta pembelajaran yang menjenuhkan, membosankan dan tidak menyenangkan. pengkondisian lingkungan yang kondusif akaemik ini penting dan menjadi tanggungjawab bersama.

Kedelapan, partisipasi warga sekolah perlu ditekankan adalah partisipasi tenaga kependidikan. Partisipasi tenaga kependidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala sekolah. karena dalam hal ini kepala sekolah harus mampu meningkatkan produktifitas dan peningkatan kinerja tenaga kependidikan. Ada tujuh kegiatan utama dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yaitu 1) perencanaan tenaga kependidikan, 2) Pengadaan tenaga kependidikan, 3) pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, 4) promosi dan mutasi, 5) pemberhentian tenaga kependidikan, 6) kompensasi, dan 7) penilaian tenaga kependidikan.

KESIMPULAN

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar diharapkan memudahkan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Instrumen Penilaian Menurut Permendikbud, Strandar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan secara seimbang, untuk mengetahui bahwa setiap siswa sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Muatan di dalam penilaian antara lain, ruang lingkup materi,

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program dan proses. Salah satu teknik dan instrumen penilaian adalah penilaian kompetensi keterampilan yang terdiri dari penilaian kerja, tes praktek, projek dan portopolio.

Berdasarkan hasil penelitian yang terlah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis jabarkan menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Analisis SKL, KI, dan KD, pengembangan Indikator, serta Pembuatan Kisi-Kisi dan Instrumen Penilaian merupakan bagian dari perencanaan penilaian secara umum. Dan ini berlaku juga untuk penilaian keterampilan kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini difokuskan pada pembentukkan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konstekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap konsep apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.
2. Pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui penilaian praktik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio yang diberikan setelah pembelajaran. Penilaian keterampilan dapat juga dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik kompetensi dasar.
3. Pemberlakuan kurikulum 2013 akan menghadapi sejumlah tantangan. Minimalnya tantangan tantangan tersebut akan berkenaan dengan guru, waktu, TIK, bahan ajar, penilaian, dan strategi pembelajaran. Terungkap bahwa kendala yang paling dominan dalam menerapkan penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah berkenaan dengan waktu pelaksanaan. Ketidakmerataan kemampuan siswa menyebabkan

penilaian keterampilan kewarganegaraan melalui produk atau proyek sering melenceng dari perencanaan.

4. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penerapan penilaian keterampilan kewarganegaraan tidak terlepas dari peran pemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas utamanya dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia, kreativitas guru juga harus ditingkatkan karena kunci implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah kreativitas guru, sebab guru merupakan factor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar. Sosialisasi dalam kurikulum 2013 sangatlah penting dilakukan agar semua pihak yang terkait dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan yang harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga mereka memberikan dukungan terhadap penilaian keterampilan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). Penerapan Teknik-Teknik Penilaian Pembelajaran Sejarah Di Man 1 Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *8*(9), 1–58.

Mahdiansyah, M. (2019). EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA (Studi Kasus di Enam Kota). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, *11*(2), 48–63. https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.224

Adianto, S., Ikhsan, M., & Oye, S. (2020). Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, *7*(2), 133–142. https://doi.org/10.17977/um031v7i22020p133

Akif, dkk. (2015). Pengembangan Model Penilaian Keterampilan Intrapribadi dan Antarpribadi Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar. Jurnal Penelitiian dan Evaluasi Pendidikan, 19 (1), hlm. 1-12.

Mulyasa, E. (2014). Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winataputra, U. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan demokrasi. (Disertasi). Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.